

PEMBINAAN STABILITAS NASIONAL DINAMIS DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Dani Purwanegara*)

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mengalami perubahan sosial, politik, ekonomi dan keamanan nasional sebagai akibat pembangunan nasional yang kurang ditunjang oleh ketahanan sosial budaya sebagai landasan untuk mencapai kemajuan pembangunan. Kenyataan sosial budaya yang selama ini seolah terabaikan adalah kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan yang mencerminkan pola-pola adaptasi setempat maupun perbedaan pengalaman sejarah. Kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia secara horisontal dan vertikal itu sangat besar pengaruhnya terhadap persepsi dan apresiasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Dampak krisis nasional yang diawali oleh krisis moneter telah memporak-porandakan hasil-hasil pembangunan selama ini, mengakibatkan menurunnya ketahanan nasional, menurunnya kredibilitas penyelenggara negara, rendahnya kepercayaan rakyat dan dunia internasional terhadap pemerintah. Penyebab utamanya antara lain adalah runtuhnya moral, nurani dan etika bangsa, yang hampir melanda seluruh lapisan masyarakat. Salah satu implikasi yang menonjol adalah terjadinya in-

stabilitas di seluruh lini. Untuk memulihkan stabilitas nasional bukanlah perkara ringan.

Upaya untuk memulihkan kondisi stabilitas nasional masih dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi kehidupan bangsa Indonesia masih berada dalam kondisi bangkit dari krisis multidimensional, tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, pembinaan stabilitas nasional selanjutnya harus dapat menggugah bangsa Indonesia untuk bangkit dan segera

*) Laksamana TNI Dani Purwanegara, M.M., Staf Ahli Setjen Wantannas RI.

keluar dari krisis. Dalam melanjutkan reformasi harus tetap memegang teguh cita-cita bangsa yaitu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain tanpa harus meniru metodenya secara serampangan.

Dinamika perubahan kehidupan manusia

Arus globalisasi mengarahkan kita pada pandangan ke depan, tetapi pada saat yang sama menghendaki pertimbangan yang realistis dan pragmatis agar harapan kita dapat menjadi kenyataan. Adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita tengah mengalami masa transisi sebagai implikasi langsung dari arus globalisasi. Pada masa transisi ini tengah terjadi perubahan penting di bidang politik, ekonomi, keamanan, hukum dan sosial budaya. Perubahan yang terjadi bukannya tanpa visi, masukan dan orientasi. Misalnya perubahan itu disertai orientasi baru yang sangat memberlakukan nilai, pendekatan serta dinamika ekonomi pasar. Perubahan itu disertai kesadaran, kemauan dan kenyataan saling bersaing ke dalam dan ke luar negeri.

Perubahan itu bahkan juga menyentuh munculnya kekuatan-kekuatan sosial baru dalam masyarakat. Munculnya kekuat-

an-kekuatan sosial yang baru, mau tidak mau bergerak dan berpengaruh terhadap perikehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Jika kita terus menerus membiarkan masyarakat bangsa kita, sekedar terbawa oleh fragmentasi perpolitikan dan persaingan sosial politik dan sosial ekonomi akan membuat masyarakat bangsa yang majemuk ini semakin tak acuh bahkan saling curiga, kita tidak akan mampu memanfaatkan kesempatan serta menjawab tantangan.

Resultante dari dinamika politik ekonomi dalam konteks pembangunan adalah kecenderungan dan arah yang bergerak untuk memperbaharui, menyegarkan dan memperkuat kebersamaan serta persatuan. Demikian banyaknya unsur perubahan yang sangat dinamis mempengaruhi berabagai aspek kehidupan bangsa sehingga mendorong bangsa Indonesia terbawa keposisi sulit, apakah mampu bertahan, keluar sebagai pemenang atau kalah dalam perbatasan global.

Usainya perang dingin telah menimbulkan percepatan dan perubahan yang mendasar dalam tata kehidupan antar bangsa. Perubahan tersebut antara lain menguatnya saling keterkaitan dan ketergantungan antara masalah nasional dengan

masalah regional dan global. Banyak kemudahan yang didapat oleh masyarakat melalui jaringan komunikasi global sehingga praktis hubungan antar individu tidak lagi mampu dihambat oleh otoritas negara.

Kondisi di atas telah melahirkan gelombang reformasi nasional, maraknya demokratisasi dan HAM membuka peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan tuntutan dan aspirasi, hak sosial dan politik masing-masing secara lebih bebas. Pada kondisinya yang ekstrim ekspresi kebebasan tersebut sering kali meniadakan kebebasan orang lain akibat yang lebih luas adalah timbulnya ekspresi kelompok masa yang meniadakan kelompok masa lainnya, menimbulkan konflik horizontal, bahkan meningkat menjadi tindakan kekerasan, pada gilirannya menimbulkan instabilitas. Bila hal ini tidak dapat dikendalikan bukan mustahil dapat membahayakan stabilitas nasional, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Singkat kata globalisasi, reformasi nasional dan euforia reformasi yang salah kaprah tidak menjamin terpeliharanya stabilitas nasional, oleh sebab itu untuk membina stabilitas nasional agar mampu memberikan kontribusi bagi berkembangnya keamanan dan kesejahteraan

masyarakat, menjadi keharusan.

Hakekat Stabilitas Nasional Dinamis

Stabilitas Nasional pada hakekatnya adalah kondisi Ketahanan Nasional pada sasaran, ruang dan waktu tertentu. Stabilitas nasional sebagai kondisi kontekstual kehidupan nasional mengikuti kaidah Ketahanan Nasional yaitu senantiasa *bersifat dinamis*, artinya *selalu berubah* menurut ruang, waktu dan sasaran tertentu. Kondisi stabilitas nasional dinamis ditentukan oleh derajat interdependensi, interaksi dan interelasi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Derajat interdependensi tersebut ditentukan oleh tiga kata kunci yaitu *loyalitas, komitmen dan disiplin* antar aspek kehidupan yang dicerminkan oleh tatalaku aktor yang terlibat didalamnya, dalam hal ini warga masyarakat yang menjadi inti penggerak aspek kehidupan yang bersangkutan.

Komponen-komponen yang sangat mempengaruhi kondisi stabilitas nasional adalah kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan militer sebagai ilustrasi dapat kita gambarkan sebagai lingkaran stabilitas berada ditengah, dikelilingi lingkaran politik, ekonomi, sosial budaya dan militer. Bila terjadi gaya sentripetal

maka keempat lingkaran akan saling mengumpul menjadi satu membentuk kondisi yang semakin stabil. Sebaliknya gaya sentrifugal akan menjauhkan keempat lingkaran poleksosbudmil tersebut atau dengan kata lain kondisi negara semakin kurang stabil. Sedangkan selisih gaya sentripetal dan gaya sentrifugal adalah derajat toleransi yang masih dapat dianggap stabil.

Sesuai dengan karakter ketahanan nasional yang harus senantiasa dibina maka kondisi stabilitas nasional harus pula dibina secara berkesinambungan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh seluruh komponen kekuatan bangsa sesuai dengan posisi, fungsi dan kemampuan masing-masing komponen. Dalam hal ini, pemerintah adalah pengemban fungsi, fasilitasi, regulasi dan kontrol terhadap seluruh aspirasi, ekspresi dan partisipasi komponen kekuatan masyarakat bangsa. Oleh sebab itu pembinaan stabilitas nasional dinamis kata kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah untuk merespon aspirasi, ekspresi dan partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan.

Paradigma Nasional Sebagai Isu Pokok Permasalahan Stabilitas Nasional

Untuk dapat dioperasikan dalam sistem kenegaraan, Wawasan Nusantara harus diimplementasikan dengan penjabaran sebagai Sistem Kehidupan Nasional atau Sistem Kehidupan Bernegara. Sistem Kehidupan Nasional, memberikan dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta memberikan dorongan guna peningkatan daya kreasi integrasi, emansipasi dan evolusi bangsa dan negara, Sistem Kehidupan Nasional demikian itu merupakan konsep Ketahanan Nasional yang berarti kondisi dinamik suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dari pengertian Ketahanan Nasional (Tannas) tersebut, maka Tannas mempunyai sifat ganda, yaitu sebagai *kondisi*, sebagai *sistim* atau totalitas yang utuh, dan sebagai *sarana* untuk memecahkan persoalan nasional.

Dalam suatu masyarakat lazimnya dapat dikenal pelbagai kelembagaan hidup yang mempunyai kekuasaan untuk menen-

tukan norma-norma (patokan-patokan) dan aturan-aturan tertentu yang berlaku dalam masyarakat itu, sistem kelembagaan hidup tersebut antara lain adalah sistem ekonomi, sistem keagamaan, sistem kesenian dan sistem keilmuan. Sistem-sistem kelembagaan hidup tersebut secara umum menggambarkan suatu tahap kehidupan rakyat yang disebut Sistem Kehidupan Masyarakat.

Sistem Kehidupan Masyarakat dibina menurut norma-norma dan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan untuk mengikat dan memaksa seluruh masyarakat demi terpenuhinya secara optimal kepentingan seluruh rakyat. Tahap himpunan kehidupan masyarakat yang telah diatur secara ketat itu disebut Sistem Kehidupan Politik Nasional demi tercapainya efisiensi dan ekonomi dalam usaha memenuhi kepentingan seluruh rakyat tersebut, maka sistem kehidupan Politik Nasional perlu dikelola melalui suatu tahap yang disebut Sistem Administrasi Negara, yang mengatur distribusi kekuasaan dalam negara. Kemudian ditahapkan lebih lanjut ke dalam tatanan yang disebut Sistem Pembinaan Pemerintahan yang fungsinya mengatur pembinaan birokrasi dan teknokrasi sesuai pranatanya.

Sistem Kehidupan Masya-

rakat, Sistem Kehidupan Politik Nasional, Sistem Administrasi Negara dan Sistem Pemerintahan itu membentuk suatu totalitas yang utuh. Hubungan antara keempat sistem tersebut dalam membentuk Sistem Kehidupan Nasional.

Untuk mengimplementasikan Konsep Ketahanan Nasional, dikembangkan tiga macam model, yaitu: (1) *Model normatif* atau model deskriptif. Untuk menunjukkan ciri-ciri utama sistem Nasional (Tannas), (2) *Model prediktif* dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan keadaan dan situasi lingkungan sistem Tannas dibutuhkan untuk mengadakan prognosa situasi yang akan datang, (3) *Model preskriptif*. Untuk mengadakan tindakan-tindakan intervensi terhadap sistem Tannas (yaitu membuat rencana dan program) diperlukan untuk mengadakan tindakan korektif atau terapi terhadap sistem Tannas agar memadai dengan kebutuhan.

Setiap kehidupan nasional selalu berada dalam suatu lingkungan, mengadakan interaksi dengan lingkungan tersebut. Lingkungan Strategik adalah sistem di luar sistem kehidupan nasional yang mengadakan interaksi dengan sistem kehidupan nasional tersebut, dan dapat menimbulkan ancaman, tan-

tangan, hambatan dan/atau gangguan (ATHG). Lingkungan Strategik ini tidak dapat diubah secara langsung oleh sistem kehidupan nasional. Interaksi antara Sistem Kehidupan Nasional dengan lingkungan Strategik tersebut terjadi karena adanya konsep Tannas. Oleh karena itu dalam proses pemecahan persoalan nasional, lingkungan strategik tersebut dihadapkan dengan model Tannas.

Wawasan Nusantara kita pandang sebagai dunia ideal yang kita kejar, sedang Ketahanan Nasional merupakan dunia nyata yang harus kita wujudkan, maka *pembangunan nasional* merupakan *proses kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan kondisi yang memadai guna mampu bertumbuh lebih lanjut dan mampu menghadapi ancaman*. Hasil pembangunan nasional dalam bidang *keamanan* berwujud sebagai *daya tangkal* dan *daya pukul* bangsa, sedang hasil pembangunan nasional dalam bidang *kesejahteraan* berwujud sebagai *daya imunitas* dan *daya berkembang* bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional mengandung tiga komponen, yaitu *pengembangan fisik bangsa dan negara; pembaharuan dan modernisasi*, dalam arti peningkatan cara-cara pendekatan dan pemecahan persoalan secara efisien dan ekonomik.

Seluruh lapisan rakyat mempunyai peran yang penting yaitu: (1) Sebagai *obyek*, agar stabilitas nasional dapat diwujudkan seoptimal mungkin dan (2) sebagai *instrumen* untuk mencapai sasaran tersebut; dikembangkan berbagai upaya berkaitan dengan kependudukan yang secara filsafati dan secara biologik dapat diterima sebagai *manager-entrepreneur* yang harus dapat mengelola proses pembangunan pada pelbagai pranata pembangunan nasional. Dalam konteks ini peran manajemen dan kepemimpinan nasional sangat vital.

Hubungan Pembangunan Nasional, Ketahanan Nasional dan Stabilitas Nasional

Selama perjuangan mengisi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengalami kemajuan yang amat pesat (meskipun telah pula terjadi penurunan kualitas kehidupan pada era krisis sejak tahun 1998). Dalam konteks itulah timbul ekspresi dan aspirasi masyarakat untuk turut serta menentukan tingkat kesejahteraan dan keamanannya dalam suasana kehidupan nasional yang lebih harmonis.

Keinginan berpartisipasi dalam pembangunan adalah wujud dari dambaan hidup berdemokrasi itu. Dalam ekonomi, berarti turut serta dalam proses

pengambilan keputusan ekonomi. Untuk memungkinkan ini maka kesempatan memperoleh asset dan sumber daya harus terbuka bagi semua pihak tentunya disesuaikan kemampuan dan profesi masing-masing. Supaya kesempatan ekonomi terbuka bagi semua, maka penentuan keputusan politik yang mempengaruhi perolehan asset dan sumber daya ekonomi harus pula terbuka. Gagasan inilah yang tersimpul dalam demokrasi politik yang dibarengi demokrasi ekonomi seperti terungkap dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dimasa datang proses demokrasi yang terus berlanjut harus dibarengi dengan proses desentralisasi didukung oleh proses debirokratisasi dan deregulasi.

Dalam kerangka berfikir seperti tersebut di atas, maka penghayatan dan pengamalan atas Wawasan Nusantara (Wasantara) dan Ketahanan Nasional (Tannas), merupakan jawaban yang logik, Wawasan Nusantara akan menjamin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional secara serasi dan selaras, serta tanggung jawab bangsa tentang diri dan lingkungannya yang serba nusantara. Wawasan Nusantara menjamin terwujudnya integritas, identitas dan eksistensi nasional. Sedangkan Ketahanan

Nasional akan menciptakan suatu daya tangkal dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk dan hakikat ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan Nasional menjamin terwujudnya keuletan dan ketangguhan serta daya tahan nasional, yang sangat diperlukan dalam pembangunan.

Wasantara dan Tannas yang diimplentasikan secara luwes akan mampu menyamakan pola pikir dan pola tindak, dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan nasional. Mampu mengarahkan berbagai kegiatan untuk meraih tujuan bersama, serta mengurangi, membatasi dan bahkan meniadakan kesenjangan, kesimpangsiuran maupun tumpang-tindih pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Nasional yang berwawasan Nusantara, meletakkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai syarat mutlak bagi penyelenggaraannya. Hal ini berarti, bahwa keberhasilan Pembangunan Nasional tidak hanya diukur dari kemajuan yang dicapai, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkannya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa.

Implementasi Ketahanan Nasional dalam kehidupan sehari-

hari, akan tercermin dari adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan, antara berbagai aspek kehidupan yang satu dengan yang lainnya, yang mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Pertahanan Keamanan, serta sekaligus unsur alamiah yang mendukungnya, yaitu geografi, demografi, serta sumber daya alamnya. Penyelenggaraan Pembangunan Nasional berdasarkan konsepsi Ketahanan Nasional, serta keterpaduan antara sektor sedemikian rupa, sehingga hasil yang dicapai pada suatu sektor akan memperkuat sektor yang lain, demikian pula sebaliknya. Pada gilirannya mampu mewujudkan stabilitas nasional dinamis.

Penegakan HAM Sebagai Inti Permasalahan Stabilitas Nasional

Manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat adalah subyek sekaligus obyek dari pembinaan stabilitas nasional. Oleh sebab itu inti permasalahan pembinaan stabilitas nasional adalah manusia yang terjamin hak-haknya sesuai prinsip HAM. Dalam hal ini fungsi negara dalam penegakan HAM meliputi fasilitas, regulasi dan control terhadap penegakan HAM itu.

Untuk memahami lebih jauh tentang penegakan HAM maka

HAM yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, menelusuri sejarah perkembangannya di Eropa Barat untuk kemudian diterapkan ke dalam masyarakat kita dewasa ini, atau mencarinya dalam kandungan kehidupan masyarakat Desa Indonesia yang masih mempunyai "*sociale structuur*" yang asli (bukan Desa seperti yang ada dewasa ini yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang No. 32 Th. 2002 tentang Pemerintahan Daerah) dan menyesuaikan dengan perkembangan asas-asas kehidupan negara modern.

Di negara-negara Barat HAM senantiasa berawal dari hak-hak individu dalam konstataasi "*teori perjanjian*" dan merupakan hak-hak yang 'tidak diserahkan' kepada negara, karena itu negara tidak berhak mencampurnya apalagi menggangukannya. HAM di Barat adalah "*inalienable rights*", hak-hak yang tidak dapat dipindahtangankan. HAM di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar faham Persatuan Indonesia dan berkonstitusi UUD 1945 bukan hanya ada tetapi juga berkembang dan diakui eksistensinya. Negara mengakui hak-hak asasi orang seorang dan di samping itu mengakui juga hak-hak kelompok seperti keluarga, masyarakat, pagu-

yuban masyarakat, dan negara. Karena itu dinegara Republik Indonesia HAM tidak berdiri sendiri melainkan berdampingan dengan kewajiban asasi manusia (KAM), terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, dan terhadap negaranya. Demikian juga sebaliknya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan manusia dalam kedudukan yang tinggi. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab menunjukkan hal itu. Hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan digariskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan juga diakui (Pasal 27 ayat (2)). Kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan dengan tulisan dituangkan dalam ketentuan Pasal 28. Juga hak asasi yang paling dalam yaitu hak tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan dijamin oleh Negara.

Selanjutnya penegakan HAM akan semakin terjamin dalam pemerintahan yang semakin demokratis, demokrasi merupakan suatu cita (*idée*) yang dalam penyelenggaraannya tidak bebas nilai, seluruh paradigma demokrasi berikut wawasan dasarnya, tampak dalam sistem norma tata

kehidupan suatu bangsa serta tampak pula dalam fakta empirik penyelenggaraan kehidupan politik sehari-hari dalam kenyataan.

Paradigma demokrasi tentang adanya hak untuk memperoleh kekuasaan politik secara sah dan lain-lain misalnya, harus tampak dalam pemilihan umum dan sistemnya, dalam aturan tata tertib pengambilan keputusan, dalam kebebasan menyatakan pandangan dan pendapat yang berbeda dan terbuka, dalam penyediaan waktu yang cukup bagi pembahasan dan diskusi masalah-masalah kenegaraan yang dihadapi.

Berbagai paradigma demokrasi terlihat pada unsur-unsurnya yang formal, antara lain: (1) Dikakuinya hak untuk memperoleh kekuasaan politik atas dasar persaingan yang sehat; (2) Adanya sistem pengambilan keputusan (politik) berdasar satu orang satu suara; (3) Adanya kemungkinan menganut berbagai pandangan politik yang berbeda-beda (kecuali yang dilarang oleh Undang-undang) sehingga dimungkinkan dan dibenarkan adanya perbedaan pendapat; (4) Dianutnya pengambilan keputusan (politik) yang berdasar asas suara terbanyak; (5) Dihormatinya hak-hak mereka yang tergolong minoritas dalam perbedaan pandangan dan pendapat.

Dalam penyelenggaraan bentuk pemerintahan yang disebut demokrasi, wawasan dasar dari semua itu adalah adanya dan diakuinya serta dijaminnya asas persamaan dan asas kebebasan.

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 menetapkan dirinya sebagai negara demokratis. Hal itu terlihat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Batang Tubuh UUD 1945, dalam berbagai produk hukum seperti yang tercantum dalam Ketetapan-ketetapan MPR, dalam berbagai Undang-undang, dan dalam Peraturan-peraturan Pelaksananya.

Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah Pancasila, wawasan demokrasi (tertuang dalam rumusan Sila ke-4, yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan), Sistem Pemerintahan Negara Indonesia di Pusat tercermin dalam wujud Lembaga-lembaga Negara seperti MPR, Presiden, DPD dan DPR. Selain itu lembaga demokrasi tampak pula di Daerah seperti Lembaga Perwakilan Daerah (DPRD) dan dalam Sistem Pemerintahan Desa.

Beranjak dari pandangan bah-

wa manusia adalah makhluk perorangan (*enkelwezen*) dan makhluk sosial (*gemeenschap-swezen*) sekaligus, sebagai makhluk perorangan dalam hubungan dengan kelompoknya adalah pribadi yang mengemban nilai-nilai yang 'abadi' baginya —, maka kontrak sosial masyarakat bangsa juga mengemban nilai-nilai sebagai cita yang abadi baginya. Bagi masyarakat bangsa Indonesia nilai-nilai itu ialah sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang satu demi satu relatif telah diterima baik oleh bangsa Indonesia maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, diharapkan dapat merupakan nilai-nilai 'abadi' dalam perjalanan panjang sejarah bangsa dan negara Indonesia.

Cita Negara Persatuan Indonesia telah diterima oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dalam wujud UUD 1945, batang tubuh UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok, sedangkan rinciannya dan aktualisasinya dalam kenyataan, dari waktu ke waktu dijabarkan dalam aturan-aturan pelaksanaannya. Dengan demikian agar Cita Negara Persatuan Indonesia senantiasa dapat menjadi 'bintang pemandu' dan 'kekuatan' yang memberikan bentuk kepada kehidupan rakyat Indonesia dalam ber-

masyarakat, berbangsa, dan bernegara maka Paradigma Pancasila, Wasantara, Tannas dan Pembangunan nasional menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar.

Stabilitas Nasional, Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pengertian paradigma masa lampau, selalu terdapat garis pemisah yang jelas antara kawan dan lawan, dan oleh karenanya dengan jelas pula dapat disusun satu kekuatan nasional, baik untuk mempertahankan diri sendiri maupun untuk menangkal niat yang tidak baik dari lawan. Hal itu telah menanamkan secara psikologis adanya gambaran tentang kekuatan-kekuatan fisik yang berhadapan satu sama lain sepanjang garis pemisah tersebut di atas. Dalam perkembangan selanjutnya hingga saat ini, kita tidak bisa lagi berpikir dalam paradigma tersebut di atas, karena semua negara dan semua masyarakat bangsa telah menjadi saling terkait dan saling tergantung satu sama lainnya.

Oleh karena itu, paradigma baru yang harus dikembangkan adalah "*Ketahanan Stabilitas*". Dalam paradigma yang baru ini tidak terlalu dipersoalkan tentang lawan atau ancaman. Akan tetapi yang dipermasalah-

kan adalah risiko dan tantangan. Hal ini disebabkan karena setelah perang dingin berakhir, tiap bangsa di dunia ini secara hampir serentak telah menempatkan kepentingan ekonominya sebagai kepentingan nasional yang utama. Akibat dari pada itu muncullah sederetan tantangan terhadap pencapaian kepentingan nasional tersebut. Di sini tidak lagi kita bicara tentang ancaman, akan tetapi tentang risiko nasional terhadap kemungkinan satu sasaran pembangunan tidak dapat dicapai ataupun tercapainya sasaran hanya sebahagian saja.

Sungguhpun dalam era Perang Dingin ini perdamaian masih belum menyentuh dan hadir pada setiap kawasan dunia, akan tetapi mengingat peningkatan kesejahteraan rakyat serta peningkatan taraf hidup masyarakat sangat didambakan dimana-mana, maka secara serentak pula muncul satu kebutuhan untuk menjaga stabilitas, baik dalam negeri maupun stabilitas lingkungannya. Tidaklah dapat dipungkiri lagi adanya hubungan yang erat antara kondisi stabilitas dengan pertumbuhan,

Adanya kebutuhan untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat telah menghasilkan

satu kenyataan bahwa hal itu menuntut adanya kerjasama dan kemauan hidup berdampingan secara damai. Stabilitas Nasional mengandung makna kondisi dinamis berisikan keuletan dan ketangguhan, menghadapi dan mengatasi setiap macam distorsi yang timbul sebagai akibat adanya pilihan dan prioritas antar kesejahteraan nasional dan keamanan nasional, meskipun telah kita sadari bersama bahwa keduanya tak dapat dipisahkan.

Bisa saja dalam tahap tertentu titik berat kehidupan bangsa diletakkan pada keamanan nasional. Tetapi titik berat pada keamanan nasional, tidak berarti boleh mengabaikan sama sekali kesejahteraan nasional, demikian sebaliknya. Jadi memelihara stabilitas nasional bukanlah semata-mata memelihara kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan yang mengandung faktor moral dan spiritual. Stabilitas nasional tidak hanya bersandar pada kekuatan dan kekuasaan. Membangun stabilitas nasional tidak hanya dapat dilakukan oleh bangsa dan negara yang sudah kaya dan maju, tetapi juga oleh bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Mengembangkan stabilitas nasional yang meliputi semua aspek kehidupan bangsa, diusahakan melalui terwujudnya kewibawaan nasional yang me-

mancar ke luar. Wujud konkritnya tidak hanya berupa proyeksi kekuatan lahir saja, melainkan satu pancaran kekuatan lahir dan batin. Kewibawaan mengandung kemampuan mengembangkan daya saing di setiap bidang ketika menghadapi dunia luar.

Stabilitas nasional harus bersifat dinamis, disesuaikan dengan perkembangan keadaan internasional dan bangsa sendiri. Kondisi tertentu mungkin sudah menunjukkan adanya stabilitas nasional yang memadai. Tetapi kalau diterapkan pada masa lain, belum tentu kondisi itu sudah memadai. Oleh karena itu, harus senantiasa diadakan penilaian keadaan, baik internasional maupun nasional, agar ada perwujudan kondisi yang tepat. Bagaimana wujud stabilitas nasional Indonesia yang ingin dicapai. Selanjutnya sudah menjadi kesepakatan bahwa Pancasila adalah asas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, berarti Pancasila menjadi *way of life* kita, yang harus selalu kita pelihara.

Pancasila harus mempunyai cukup ketahanan untuk menghadapi dan mengatasi seluruh tantangan. Sudah tentu tidak akan tercapai hanya dengan membicarakan Pancasila secara muluk. Dalam penataran tentu

banyak manfaatnya, karena dapat membuka pikiran orang secara lebih luas dan mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Namun harus diikuti oleh usaha untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi kenyataan hidup (*living realities*) dalam masyarakat Indonesia. Ketika Pancasila menjadi kenyataan hidup, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia ada kelemahan yang disebabkan oleh interpretasi tertentu terhadap nilai-nilai Pancasila. Kelemahan itu, karena kita selalu membandingkan kehidupan di Indonesia dengan yang terjadi di luar kita, khususnya dalam hubungan kesejahteraan dan keamanan nasional. Kalau ternyata kondisi dalam kehidupan bangsa Indonesia ada faktor-faktor tertentu yang mengurangi kadar kesejahteraan dan keamanan nasional, maka kita harus mampu melakukan reinterpretasi Pancasila. Bukan ajaran dan nilai Pancasila yang kita ubah, melainkan interpretasi terhadap nilai praxis yang kita tinjau kembali agar mampu menghasilkan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu Pancasila adalah pandangan hidup yang bersifat terbuka dan dinamis, dengan demikian Pancasila akan mempunyai ketahanan tinggi terhadap berbagai tantangan.

Kondisi Riil stabilitas bidang Politik saat ini

Meskipun demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan sistem politik dan pemerintahan belum terarah kepada sasaran optimalnya, indikatornya antara lain belum mantapnya infra dan supra struktur politik, belum terwujudnya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, belum mantapnya komunikasi, informasi dan media massa serta adanya euforia demokrasi yang berlebihan. Partai politik dan organisasi massa telah tumbuh dan berkembang, namun masih berorientasi pada penonjolan agama, etnis dan kedaerahan, sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya konflik yang bernuansa politik dan Sara.

Banyaknya Partai Politik yang belum mengakar kepada aspirasi masyarakat bawah dan terbentuknya lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilu yang lalu relatif belum mapan. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datang dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun

kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melewati batas kepatutan dan kecenderungannya mengarah anarkhis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih bersifat kontekstual. Permasalahan politik nasional berkembang semakin rumit dan belum ada tanda-tanda penyelesaian konkrit yang mengarah kepada berkembangnya sistem politik berdasarkan prinsip demokrasi karena masih ada kelompok-kelompok kepentingan yang ingin menggoyahkan reformasi.

Selain daripada itu tugas penyelenggara negara belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat karena masih banyak dijumpai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Meskipun demikian reformasi telah menunjukkan hal-hal yang positif seperti berkembangnya kesadaran politik masyarakat termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan besarnya tuntutan demokratisasi. Adanya kebebasan dan keterbukaan yang telah disalah tafsirkan oleh beberapa golongan/kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI (Irian Jaya, Aceh dan Riau); menunjukkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara

serta nasionalisme masyarakat belum kokoh.

Semua peristiwa yang terjadi di dalam negeri dan bernuansa isu global (HAM, Demokratisasi dan Lingkungan Hidup) dapat menjadi masalah krusial. Untuk itu peranan hubungan luar negeri menjadi semakin penting dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Permasalahan yang dihadapi adalah efektifitas kemampuan diplomasi belum sepenuhnya mampu mengembalikan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang menghormati dan menjamin hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan.

Kondisi Riil stabilitas bidang Hukum saat ini

Sebagai akibat dari penyelenggaraan negara selama ini pembangunan hukum yang meliputi budaya hukum, materi hukum, lembaga hukum, prasarana dan sarana serta penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia masih memprihatinkan.

Budaya hukum masyarakat belum didasarkan pada nilai-nilai rasional, tetapi masih cenderung mengikuti sikap-sikap emosional seperti tindakan main hakim sendiri.

Selain itu banyak peraturan

perundang-undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku dan adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta sering berubah-ubah, dan ketidakjelasan ketentuannya, sehingga tidak mampu menampung dinamika perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Langkanya tenaga pembuat (perancang) hukum yang profesional mengakibatkan perkembangan produk hukum menjadi sangat lambat.

Lembaga penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan belum sepenuhnya mandiri, demikian pula halnya dengan aparat penegak hukum di luar administrasi negara juga belum sepenuhnya mandiri; di samping itu aparat penegak hukum belum memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi. Tidak kalah pentingnya prasarana dan sarana hukum masih jauh dari memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Kondisi tersebut di atas juga merupakan konsekuensi logis dari tingkat perkembangan masyarakat pada semua aspek kehidupan yang saling terkait.

Kondisi Riil Stabilitas bidang Ekonomi saat ini

Ekonomi nasional masih di-

hadapkan pada upaya pemulihan kondisi ekonomi yang belum seluruhnya sehat. Upaya untuk memperkokoh "*good governance*" pada sektor publik dan swasta, lemahnya sektor keuangan terutama subsektor perbankan, rapuhnya sektor riil serta tingginya tingkat pengangguran dan penduduk miskin masih merupakan masalah yang rumit. Selama berlangsungnya krisis, ekonomi konglomerasi di Indonesia mengalami kehancuran dan meninggalkan beban berat yang harus dipikul oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, sementara usaha kecil dan menengah, termasuk koperasi dapat menahan dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis tersebut.

Pada saat yang bersamaan, globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan di samping menciptakan peluang-peluang tetapi juga kendala-kendala, terutama bagi Indonesia yang fundamental ekonominya lemah. Sebagai akibatnya, perekonomian nasional sangat rentan terhadap guncangan pasar uang, membengkaknya hutang luar negeri, pelarian modal ke luar negeri dan ketergantungan pada bahan baku impor. Keadaan ini turut menggoyahkan kepercayaan dunia internasional, terutama para investor, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kondisi Riil Stabilitas bidang Sosial Budaya saat ini

Kondisi sosial budaya sebagai hasil pembangunan telah mampu meningkatkan kualitas, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan dinamika mobilitas penduduk. Namun akibat krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjangan sangat berpengaruh terhadap merosotnya tingkat kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, moral dan budaya, peran pemuda serta menurunnya kualitas hidup perempuan dan belum meratanya persepsi masyarakat terhadap gender. Hal ini sangat berpengaruh terhadap daya saing sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) masih rendah yang ditunjukkan dengan urutan ke 106 dari 174 negara. Adanya konflik sosial yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan gejala ikutannya menyebabkan adanya kemunduran dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyebabkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan sosial menjadi semakin merosot. Krisis juga mempengaruhi pemenuhan gizi terutama pada bayi, anak Balita, ibu hamil, ibu menyusui dan dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya "*lost generation*" di Indonesia.

Adanya kemajemukan bangsa merupakan potensi kekayaan

budaya namun sekaligus juga merupakan kerawanan terhadap potensi timbulnya konflik yang bernuansa Sara (kasus Maluku, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah). Oleh karenanya perlu dibina dengan baik agar menjadi kekuatan nyata dan dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik pariwisata. Timbulnya konflik horisontal terutama pada lapisan bawah mengakibatkan banyaknya pengungsi terutama para transmigran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses penyebaran dan pemerataan penduduk serta proses asimilasi dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi masih dihadapkan pada keterbatasan baik jumlah maupun kualitas sumber daya manusia, yang mempunyai sikap mental ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjauhkan dari kebutuhan masyarakat yang sesuai.

Kondisi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara belum mencerminkan penghayatan dan pengamalan agama yang sebenarnya. Hal ini nampak dengan adanya kesenjangan antara perilaku berdasarkan norma-norma keagamaan dengan perilaku kehidupan keagamaan sehari-hari. Pendidikan agama belum mampu me-

ningkatkan akhlak dan moral bangsa dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam era globalisasi. Akibatnya kerukunan antar dan antara umat beragama masih menunjukkan kerawanan dan sering menjadi pemicu gejolak sosial, demikian pula rendahnya penghayatan dan pengamalan agama berdampak pada upaya mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta toleransi terhadap agama lain. Selain itu dirasakan kurangnya keteladanan pemimpin-pemimpin agama, pemuka masyarakat, pejabat pemerintah dalam menyikapi situasi yang berkembang.

Kondisi bidang pendidikan pada hakikatnya merupakan akumulasi dari kebijakan pendidikan yang kurang memperhatikan keseimbangan antara pembekalan keterampilan dan keahlian kerja dengan pembentukan kepribadian bangsa secara konsisten dan berkesinambungan. Kurikulum dan bahan ajar belum cukup menampung kebutuhan wawasan keagamaan, kebudayaan, kemasyarakatan, lingkungan hidup, HAM, penguasaan Iptek dan jender yang diperlukan dalam menghadapi dinamika masyarakat dan perubahan-perubahan. Pendidikan belum mengarah untuk merangsang kreativitas dalam mengua-

sai Iptek, dalam mengembangkan sikap mental yang beretos kerja tinggi dan berdisiplin, yang pada gilirannya dapat berpikir mengenai produktivitas, kualitas, sistem, dan pelayanan. Pendidikan harus mampu menanamkan rasa cinta tanah air, idealisme, dan kesadaran kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada sisi lain anggaran negara untuk pendidikan relatif kecil, kurang terarah dan kemampuan masyarakat masih rendah. Paradigma baru pendidikan yang ingin dikembangkan dalam mencapai kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera belum jelas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan dan kesertaan masyarakat dalam pendidikan nasional.

Kondisi Riil Stabilitas Bidang Pertahanan dan Keamanan saat ini

Kondisi bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada pemulihan tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI dan POLRI sebagai akibat trauma masa lalu. Di masyarakat terjadi penurunan kesadaran belanegara. Sementara itu TNI, masih dihadapkan pada masih adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, kecilnya kuantitas personil dan ka-

daluarsanya sebagian besar alat utama TNI, termasuk ketergantungan alat utama dan suku cadangnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya. Landasan hukum baru yang dibutuhkan TNI dalam menjalankan tugas di lapangan belum lengkap, belum baik dan belum mapan. Hal tersebut menimbulkan keraguan dalam menjalankan tugas di lapangan. Kredibilitas TNI sebagai salah satu komponen pertahanan nasional masih berada dalam keadaan yang harus ditingkatkan lebih intensif.

Tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditimbulkan antara lain oleh berbagai bentuk kriminalitas, kerusakan massa, peredaran obat terlarang dan narkoba, menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, menurunnya ketahanan ekonomi, meningkatnya tingkat pengangguran demikian pula menurunnya kinerja aparat keamanan, serta kecilnya kuantitas dan kualitas personil maupun dukungan sarana - prasarana sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas aparat keamanan, khususnya Polri, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat belum dapat diatasi secara menyeluruh.

Demikian pula belum sempurnanya landasan hukum yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan tugas Polri telah menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, terutama terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Kondisi ini dalam kehidupan masyarakat modern yang demokratis kurang dapat menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat yang berkembang secara dinamis.

Proyeksi Stabilitas bidang Politik dan Hukum

Stabilitas politik menyangkut politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri merupakan perwujudan sistem politik atas dasar prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dan dijelaskan dalam UUD 1945 dan pasal-pasal lainnya. Yang menjadi inti kehidupan politik dalam negeri adalah realisasi kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Pada dimensi politik dalam negeri, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak digoyahkan oleh sistem politik lain atau pemikiran yang hendak mengubahnya menjadi sistem politik yang berbeda.

Desakan dan dorongan tidak hanya datang dari luar negeri,

tetapi juga karena usaha bangsa Indonesia sendiri. Dunia Barat, selalu menggunakan isu demokrasi dan hak asasi manusia untuk menekan Indonesia, maka untuk menghilangkan tekanan itu Indonesia harus membuktikan bahwa di Indonesia sudah berlaku dan terwujud kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya sama seperti yang dikehendaki dunia barat. Demokrasi kita tidak sepenuhnya sama dengan demokrasi yang diterapkan di dunia barat, tetapi inti pengertian demokrasi adalah sama, yaitu berlakunya kedaulatan rakyat. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, yang di Indonesia mengutamakan musyawarah dan mufakat di samping menggunakan pemungutan suara.

Mengenai HAM, bangsa Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia sudah menjalankan hal itu sesuai dengan nilai sila kedua. Bahwa pelaksanaannya tidak sepenuhnya sama dengan Dunia barat tidak berarti bahwa Dunia barat lebih unggul dalam mempraktekkan sikap kemanusiaan ketimbang bangsa Indonesia. Yang terpenting, untuk menegakkan ketahanan politik dalam negeri terhadap tantangan dari luar, adalah implementasi dari nilai-nilai dan ketentuan

yang sebenarnya sudah dimiliki bangsa Indonesia, yaitu dalam Pancasila dan UUD 1945 serta tak bertentangan dengan HAM internasional.

Berlakunya secara efektif demokrasi dan kondisi kemanusiaan yang baik mempunyai pengaruh yang positif untuk menjauhkan organisasi sosial politik dari kecenderungan negatif itu. Partai Politik dapat hidup mandiri, terutama dalam aspek keuangannya. Pemerintah menunjukkan pekerjaan yang sebaik mungkin, terutama dalam hal efektivitas menjalankan fungsinya dan perilaku yang jujur dan bersih dari aparat pemerintah (*effective, clean government and good governance*).

Kekuasaan hukum amat penting untuk memelihara kepercayaan rakyat sesuai situasi dan kondisi bangsa sendiri. Demikian pula kebebasan disertai tanggungjawab kepada kepentingan masyarakat akan membuat rakyat lebih suka dengan kondisi bangsanya sendiri. Ketahanan politik dalam negeri sangat ditentukan oleh pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah. Kondisi sekarang sangat merangsang perkembangan etnik. Setiap sarana yang dapat mempersatukan bangsa harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran itu, seperti sarana komunikasi,

transportasi serta kebijaksanaan pemerintah pusat yang arif bijaksana, efektivitas Aparat Keamanan dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Politik luar negeri yang bebas aktif harus tetap dijaga. Tugas internasional harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak UUD 1945. Indonesia sebagai anggota ASEAN mengusahakan agar anggota ASEAN makin erat hubungannya dalam semua bidang kehidupan, tanpa melepas kedaulatan negara masing-masing. Indonesia harus tetap berperan penting dalam Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sebagai anggota APEC Indonesia memperjuangkan agar semua sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud pada waktunya.

Proyeksi Stabilitas bidang Ekonomi

Stabilitas ekonomi merupakan hal yang sama pentingnya dengan stabilitas di bidang lainnya. Mengingat persaingan ekonomi dalam lingkungan internasional makin keras, maka tantangan untuk mengadakan kerjasama ekonomi, kemitraan bersifat seimbang dan masing-masing mempunyai cukup daya saing merupakan suatu keharusan.

Bila tidak demikian akan terwujud kemitraan yang berat sebelah.

Ekonomi Indonesia memerlukan produktivitas yang tinggi yang menghasilkan produksi dalam jumlah yang dapat dipasarkan dengan baik baik di dalam maupun di luar negeri mempunyai mutu yang tinggi dan harga yang menarik. Harus ada distribusi penghasilan yang cukup merata sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin dapat ditekan pada batas kewajaran. Produksi berkembang, terutama untuk menambah kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang setiap tahun meningkat sekitar 2 juta orang didukung investasi yang dilakukan secara teratur. Daya tarik terhadap investor terjamin bila kekuasaan hukum berjalan, ada pengaturan pemerintah yang memudahkan investasi, ada kemampuan bekerja yang bermutu dari tenaga kerja Indonesia dan suasana masyarakat baik dan mendukung terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kelancaran usaha.

Peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi harus selalu menjadi perhatian agar barang buatan Indonesia dapat menjadi raja di pasarnya sendiri dan sebaliknya dapat memasuki pasar bangsa lain. Berbagai potensi alam yang menyediakan aneka ragam bahan baku serta

peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam peningkatan produksi. Harus selalu dijaga agar ketergantungan kita terhadap luar negeri tidak berlebihan besarnya. Impor sesuai dengan keperluan, harus mempunyai cukup devisa untuk membiayainya. Harus ada pemerataan produksi dilihat dari sudut daerah. Peran teknologi dalam produksi dan pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang makin tinggi kecakapannya. Diusahakan agar nilai tambah dalam seluruh proses produksi meningkat. Tenaga kerja yang lebih tinggi kecakapannya.

Pemerintah dapat mengadakan BUMN yang menjalankan produksi dengan cara pengaturan. BUMN dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan manajemen perusahaan, dan tidak menjadi perusahaan yang manajemennya birokratis yang kurang efektif dan tidak efisien. BUMN tidak boleh kalah tingkat efektivitas dan efisiensinya dari perusahaan swasta. Harus dijauhkan pemberian monopoli, karena mempunyai pengaruh buruk kepada perkembangan ekonomi dan perusahaan itu sendiri. Yang penting kehadiran perusahaan kecil dan menengah dalam jumlah besar dan dengan mutu yang tinggi merupakan mitra yang wajar dari pe-

rusahaan-perusahaan besar.

Harus diusahakan membesarnya ekonomi nasional melalui pertumbuhan yang tinggi dan kontinyu. Pemerataan dalam distribusi kekayaan sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi kecil. Sistem ekonomi yang digunakan merupakan kombinasi dari ekonomi berorientasi pasar dan ekonomi dengan asas kekeluargaan. Ekonomi Indonesia tidak hanya diserahkan pada kekuatan pasar saja yang hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat lebih dulu, tetapi ada peran pemerintah untuk melakukan pengaturan yang menjamin keadilan. Namun pengaturan pemerintah itu tidak boleh begitu jauh sehingga merugikan dan menghambat jalannya ekonomi. Sebaliknya, mendorong tumbuhnya ekonomi nasional serta terwujudnya daya saing internasional yang memadai.

Proyeksi Stabilitas bidang Sosial Budaya

Stabilitas budaya tidak kalah pentingnya dalam menjamin stabilitas nasional Indonesia. Bahkan mungkin ketahanan budaya lebih penting karena mempunyai pengaruh besar terhadap sikap hidup dan perilaku masyarakat Indonesia dalam melaksanakan berbagai kegiatan lainnya. Untuk menghadapi penetrasi yang

agresif dari kebudayaan Barat harus diadakan pembudayaan Pancasila yang jauh lebih konkrit dalam masyarakat Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh kehidupan bangsa. Perkembangan budaya Pancasila tidak dapat mengabaikan budaya Barat. Pancasila harus mampu melakukan sintese dengan nilai Barat, justru untuk menjamin kelangsungan Pancasila. Penting sekali diadakan pendidikan terhadap para orang tua agar dapat menjadi pemimpin keluarga yang baik serta mendidik dan membina anak-anaknya dengan semestinya.

Toleransi antar para pemeluk agama, yang menjadi sifat bangsa Indonesia, harus terus dipelihara dan dijaga jangan sampai dapat dikendorkan oleh usaha pihak lain yang mempunyai interest tertentu. Semua agama diberikan kesempatan luas untuk berkembang asalkan menjalankan ajarannya yang benar dan mengajak umatnya untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya moralitas yang tinggi, terwujudnya disiplin dan etos kerja yang kuat. Pelaksanaan kehidupan beragama tidak boleh hanya menyentuh kepada substansi ajaran agama hanya sebatas aspek luarnya dan ritual saja akan tetapi pada aspek implementasinya. Hal ini penting kare-

na kehidupan antar manusia tak peduli manusia tersebut memeluk agama berbeda akan aman, tertib dan damai bila masing-masing pemeluk agama menjalankan agama dan kepercayaannya di atas landasan kebenaran, kebaikan dan ketulusan.

Proyeksi Stabilitas bidang Pertahanan dan Keamanan

Yang kita tuju adalah satu kondisi pertahanan-keamanan yang tidak hanya kuat dari segi lahiriahnya, tetapi juga mengandung kekuatan batin yang kemudian terwujud dalam bentuk keuletan. Syarat ketahanan hankam adalah hubungan yang dekat dan erat antara tentara, polisi dengan rakyat. Kita menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang memberikan peran penting sekali kepada rakyat dan TNI serta Polri secara holistik dan sinergi. Karena itu hubungan yang dekat dan erat antara TNI-Rakyat itu mutlak bagi ketahanan hankam.

Kekuatan rakyat dalam pertahanan-keamanan sangat ditentukan oleh kondisi stabilitas sosial. Kondisi sosial bangsa harus terjamin stabilitasnya, yaitu sesuai dengan persyaratan stabilitas ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Kalau terjadi perpecahan politik yang gawat, kesenjangan yang lebar antara

kaya dan miskin atau pemihakan yang meluas kepada nilai-nilai asing pasti tidak ada kondisi sosial bangsa.

Dalam lingkungan TNI harus ada moralitas yang tinggi dan adanya kepemimpinan yang memelihara kekompakannya serta efektivitasnya sebagai organisasi. Fungsi teritorial harus pula dilakukan dengan baik sehingga hubungan antara TNI dan masyarakat selalu terpelihara. Dengan begitu TNI dan masyarakat dapat saling menunjang dalam arti positif.

Kemampuan untuk menangkal subversi harus senantiasa ditumbuhkan. Untuk itu fungsi teritorial TNI harus dijalankan secara efektif dengan selalu mengikutsertakan rakyat dan pemuda. Fungsi kepolisian harus makin mampu mengatasi gangguan kriminalitas yang makin hari makin meningkat kualitasnya dan bahkan juga jumlahnya. Kondisi kriminalitas, secara langsung atau tidak langsung, akan memengaruhi tingkat ancaman subversi.

Kemampuan konvensional di darat, laut dan udara untuk menghadapi kemungkinan ancaman militer yang bersifat konvensional harus pula senantiasa dibangun dan dipelihara. Yang terutama adalah kemampuan menguasai lautan yang menjadi wewenang Indonesia, yaitu laut-

an teritorial sampai dengan zone ekonomi eksklusif. Mengingat lautan mempunyai makna ekonomi dan hankam yang diperlakukan adalah kehadiran kekuatan laut dan udara setiap saat meskipun tidak ada ancaman dari luar.

Kemampuan menghadapi serangan udara dan peluru kendali dengan cara pengembangan kemampuan udara dan peroketan kita sendiri harus pula dijadikan andalan. Hal ini penting untuk menangkal ofensif pihak lawan yang bermaksud untuk melunakkan daya tahan masyarakat kita. Kalau musuh kemudian berhasil mendaratkan kekuatannya di wilayah Indonesia, maka kita harus dapat menghalanya dengan kekuatan konvensional di darat. Pendekatan teritorial dalam pelaksanaannya harus berbeda dari masa lampau. Untuk itu organisasi teritorial TNI masih harus melakukan penyesuaian lebih baik. Persoalan pokoknya pembinaan teritorial harus benar-benar bebas dari anasir penyalahgunaan kekuasaan dengan dalih sosial politik TNI. Pembinaan teritorial selain untuk mempersiapkan kondisi ruang hidup alat juang dan kondisi juang untuk sewaktu-waktu siap digunakan untuk kepentingan pertahanan juga harus mampu memberi sinergi positif bagi kepentingan kesejahteraan dan

mendukung otoritas pemerintah daerah. Untuk memperkuat gerakan konvensional di darat, harus pula diadakan pemeliharaan dan pelatihan kemampuan anti gerilya agar setiap saat mampu melawan terhadap setiap kedudukan musuh yang telah dicapainya. Perlawanan gerilya diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan ofensif pembalasan yang memenangkan perjuangan kita. Ini adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang merupakan doktrin hankam Indonesia.

Konsep Dasar Pembinaan (Manajemen) Stabilitas Nasional Dinamis

Dalam memecahkan masalah nasionalnya Bangsa Indonesia senantiasa menggunakan pisau analisis Tannas. Melalui pisau analisis itu sesungguhnya pendekatan keamanan nasional (*national security approach*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan kesejahteraan nasional (*national prosperity approach*) keduanya menyatu secara integral, dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Tidak ada manusia yang sejahtera tanpa adanya keamanan dan rasa aman demikian sebaliknya tidak ada manusia yang merasa aman bila kesejahteraannya hanya angan-angan kosong, penuh ketidak pastian untuk

mewujudkannya.

Manusia sebagai individu adalah makhluk yang amat kompleks, sulit diduga perilakunya karena didalam diri manusia ada tiga unsur yang saling berinteraksi yaitu unsur Id, Ego, dan Super Ego. Ketiga unsur ini acap kali menimbulkan perilaku-perilaku yang saling bertolak belakang. Disatu sisi dia menginginkan ketentraman dari orang lain, tetapi bila dia sendiri mengganggu ketentraman orang lain tidak dipermasalahkan oleh dirinya. Manusia pada dasarnya mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, punya potensi untuk melakukan sesuatu yang mengancam orang lain, ia punya potensi melakukan kekerasan individu. Kekerasan ini apabila menghimpun dalam kelompok masyarakat disebut kekerasan kolektif. Bahkan sebuah masyarakat bangsa berpotensi untuk mengancam bangsa lainnya. Secara alamiah manusia berpotensi untuk mengancam ketentraman manusia lainnya. Selain itu interaksi antar manusia, interaksi manusia dengan alam tidak luput dari ancaman terhadap ketentramannya antara lain penyakit menular, bencana alam, bahkan perang sekalipun. Pada kondisinya yang ekstrim gangguan yang menimbulkan ketidakamanan disebut instabilitas.

Pembangunan, modernisasi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kekerasan. Modernisasi yang terlampau cepat, modernisasi yang timpang dan modernisasi yang tidak merata senantiasa menimbulkan dampak negatif berupa kekerasan. Kekerasan ini bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, kecemburuan dan frustrasi, kelompok-kelompok ini akan senantiasa berupaya untuk menutupi kekecewaannya melalui jalan pintas, tidak peduli jalan pintas itu melanggar norma, etika hukum bahkan melanggar ketertiban umum dan keamanan umum. Kekerasan sipil dan kekerasan politik spektrumnya amat luas, mulai dari kekerasan individual, kekerasan kelompok (unjuk rasa) pemberontakan. Insurgensi, perang saudara dan revolusi. Kekerasan politik dapat pula berbentuk kekerasan oleh Pemerintah terhadap rakyat atau sebagian rakyat.

Dari pengertian ini amatlah mudah untuk dipahami bahwa keamanan merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap manusia. Ditinjau dari logika sosial, menjamin dan memelihara keamanan merupakan tugas bersama. Pada level negara bangsa, tugas tersebut menjadi tugas pemerintah bersama rakyat. Ditinjau dari perspektif negara bangsa dan

tugas pemerintahan dimensinya bukan lagi keamanan individu tetapi bergeser menjadi keamanan nasional. Keamanan nasional (*national security*) disamping kesejahteraan nasional (*national prosperity*) adalah masalah yang amat mendasar bagi kelangsungan hidup (*survival*) dan perkembangan kehidupan (*growth*) dari sebuah negara bangsa (*nation state*). Keamanan nasional berkaitan dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman seluruh warga negara dari berbagai bentuk ancaman yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menentang pendekatan keamanan adalah sama dengan menentang hukum alam, karena rasa aman pada hakekatnya adalah merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Dapat kita pastikan, setiap organisme hidup, apakah manusia atau binatang, bahkan bagi binatang dikelas organisme yang paling rendah sekalipun, selalu memiliki sistim keamanan masing-masing. Pendekatan keamanan (keamanan disini bukan semata-mata bilamana terhadap ancaman militer tetapi bersifat multi dimensi) adalah bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional itu sendiri, karena Ketahanan Nasional yang merupakan pendekatan pelaksanaan pembangunan nasional itu pada

hakekatnya adalah suatu konsepsi didalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional disegenap aspek kehidupan nasional.

Dalam konteks ketahanan nasional, kedua aspek itu tidaklah dapat dipisahkan akan tetapi merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Kemantapan keamanan nasional akan menjamin dikembangkannya kemantapan bidang kesejahteraan nasional, sebaliknya kemantapan dibidang kesejahteraan nasional akan menjamin dikembangkannya kemantapan dibidang keamanan nasional. Ketahanan Nasional adalah cara terbaik guna mengaktualisasikan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan secara luas dan mendalam dalam memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategik demi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara.

Dihadapkan pada semakin langkanya sumber daya, peluang dan semakin ketatnya persaingan tidak sedikit para pihak berkepentingan yang menempuh jalan pintas. Pada posisi inilah menjadi amat penting kedudukan interdependensi masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk bersama-sama pemerintah mengupayakan kegiatan bersama untuk menang-

gulasi setiap dampak negatif tantangan yang muncul. Apabila dalam bela negara masyarakat merupakan komponen dasar maka kata kunci bela negara haruslah diletakkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bersama pemerintah harus bersama, bersatu padu dengan semangat solidaritas. Dengan demikian akan timbul keterkaitan struktural fungsional strategis yaitu keamanan bagi individu dan masyarakat serta keamanan bagi bangsa dan negara.

Bahwa secara ideal upaya untuk mewujudkan rasa aman dan keamanan adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, namun sesuai dengan perkembangan masyarakat pemerintah sebagai fasilitator perlu menempuh tiga tahapan yaitu: (1) Tahap inisial, yaitu dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat; (2) Tahapan partisipatoris yaitu dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat, untuk rakyat; dan (3) Tahap emansipatif yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat didukung pemerintah.

Pada seluruh tahapan itu maka pemberdayaan masyarakat dalam rangka memahami, melaksanakan dan mengaktualisasikan kesadaran bela negara merupakan faktor yang cukup menentukan. Pemberdayaan

masyarakat pada konteks ini diharapkan akan mampu melahirkan masyarakat yang kondusif untuk menumbuhkembangkan daya kerja yang kritis, kreatif dan inovatif. Dalam hal ini proses pendidikan dan pembelajaran kesadaran bela negara sesuai dengan lingkungan di mana masyarakat berada dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif dan dalam suasana yang demokratis dan terbuka merupakan tuntutan yang logik. Mengalir dari uraian diatas ini kiranya dapat disimpulkan bahwa keamanan disamping kesejahteraan adalah kebutuhan hakiki umat manusia. Oleh sebab dalam memecahkan masalah kehidupannya, pendekatan keamanan melekat padanya. Kekacauan penafsiran tentang pendekatan keamanan biasanya timbul dari kurang adanya pemahaman akan perbedaan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan militer terutama karena dicampuradukkan dengan "militarisme".

Manajemen Perubahan (*Management of Change*) sebagai pilihan pembinaan stabilitas dinamis

Perubahan adalah alamiah, namun demikian perubahan yang baik adalah perubahan yang direncanakan (*planned change*), perubahan yang tidak

diinginkan adalah perubahan yang tidak terencana (*un planned change*). Oleh karena itu, dengan kecerdasan manusia dan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi perubahan sedapat mungkin berlangsung melalui perencanaan yang memadai, dengan perkataan lain dengan *manajemen perubahan*.

Meskipun kecerdasan manusia dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijadikan instrumen pengendali perubahan, namun pada masyarakat yang sedang berkembang, perubahan ditanggapi secara beragam, bahkan sering menimbulkan kondisi *anomi*. Kondisi anomie ditandai oleh ditinggalkannya nilai dan norma lama sedangkan norma baru belum secara mapan melekat pada kehidupan masyarakat. Kondisi anomie merupakan kondisi yang paling kritis dan labil, sangat mudah dipengaruhi oleh emosi yang terbakar karena agitasi dan provokasi, pada gilirannya dapat menimbulkan perilaku agresif, destruktif, anarkhi dan nihilis.

Perubahan terencana menerapkan prinsip metamorphosis, perubahan secara bertahap (*incremental*), yang telah baik tetap dipertahankan yang tidak baik dibuang atau diperbaiki dengan demikian perubahan terencana senantiasa menghindari goncangan-goncangan yang menim-

bulkan resiko besar. Dinamika sosial yang dikendalikan, mempertahankan kesinambungan (*sustainability*) dan memelihara percepatan (akselerasi), dengan demikian kecepatan perubahan diatur melalui rekayasa perubahan dan peranan pengatur akselerasi (*Kopling*) merupakan kata kunci dari sustainability.

Manajemen perubahan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) Keadaan normal apabila semua unsur utama berubah (variabel berubah) dapat dikendalikan dengan manajemen normal, prosesnya normal dalam arti tidak mengalami guncangan-guncangan yang berarti dan (2) Keadaan krisis apabila unsur utama berubah (variabel berubah) tidak dapat dikendalikan melalui manajemen normal dengan perkataan lain harus menerapkan *manajemen krisis*, bila diperlukan menggunakan kekuatan pemaksa, dilakukan secara cepat, tepat (terukur) dan terpadu, bila perlu melakukan mobilisasi umum, untuk mengembalikan kondisi krisis menjadi normal kembali. Oleh karena itu manajemen krisis harus diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya (menghindari kecenderungan berlarut-larut).

Manajemen perubahan dan perubahan terencana memerlukan adanya power tertentu agar

sasaran perubahan dapat tercapai sesuai rencana dan masyarakat mempunyai derajat kepatuhan karena power pada hakikatnya adalah unsur penekan/pemaksa (*Pressure/Coersive*). Namun demikian penerapannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, semakin baik perkembangannya semakin lemah unsur penekan/pemaksanya. Oleh karena itu, kadar penggunaan power dapat dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu: (1) *Coersive power* diterapkan untuk membangun dan menegakkan kepatuhan masyarakat kepada pemegang kekuasaan/pemerintah dalam memelihara ketertiban masyarakat (*good order*) melalui penegakan disiplin yang ketat, (sering mengarah kepada penebaran rasa takut) dengan demikian derajat pengendalian bersifat reaktif/represif; (2) *Utility Power* diterapkan untuk mempertahankan kepatuhan masyarakat kepada pemegang kekuasaan/pemerintah dalam memelihara ketertiban masyarakat (*good order*) melalui pengembangan sinergi kepentingan yang saling menguntungkan dengan demikian derajat pengendalian bersifat proaktif; (3) *Legitimate Power* diterapkan untuk mengembangkan kepatuhan masyarakat kepada pemegang kekuasaan/pemerintah dalam memelihara ketertiban

masyarakat (*good order*) melalui pengembangan sinergi kepentingan yang saling menguntungkan dan mengembangkan kesadaran dan prakarsa masyarakat akan arti pentingnya kultur sosial yang beradab, dengan demikian derajat pengendalian bersifat preventif partisipatif.

Mengalir dari logika di atas pilihan upaya perubahan terencana, antara lain: (1) *Management by Power* pada konteks ini pengendalian dalam rangka mengarahkan perubahan kepada sasaran yang direncanakan mengutamakan pendekatan kekuatan (*Coersive*). Instrumen kekuasaan yang sering digunakan adalah instrumen militer. Strategi ini relevan digunakan untuk mengendalikan perubahan pada kondisi masyarakat yang mengalami kekacauan (*Chaos*), kekuasaan diperlukan untuk mengendalikan kondisi chaos agar kembali menjadi kondisi tertib dan memungkinkan kelancaran jalannya pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Syarat utama strategi ini adalah bersifat sementara, dengan perkataan lain harus menghindari kecenderungan menjadi permanen, sebab kecenderungan menjadi permanen akan menimbulkan otoritarianisme, oleh karena itu tidak cocok dengan kecenderungan perkembangan demokrasi; (2) *Management By Law and*

Education pada konteks ini pengendalian dalam rangka mengarahkan perubahan kepada sasaran yang direncanakan mengutamakan pendekatan penegakan hukum (supremasi hukum) dan pendidikan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya (termasuk aparat penegak hukum). Strategi ini diterapkan segera setelah *managemen by power* (setelah kondisi masyarakat kembali normal) atau relevan diterapkan bagi masyarakat yang telah berada pada kondisi tertib dan tingkat peradaban masyarakat telah dewasa (*Civilized Society*). Pada kondisi ini tugas pemerintah lebih dititikberatkan pada segi regulasi dan kontrol terhadap aspirasi, ekspresi dan eksistensi masyarakat; (3) *Management by Social Culture* pada konteks ini pengendalian dalam rangka mengarahkan perubahan kepada sasaran yang direncanakan mengutamakan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat tentang tanggung jawab, kewajiban dan hak asasinya terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada kondisi ini tugas pemerintah lebih dititikberatkan pada segi fasilitasi dan kontrol terhadap aspirasi, ekspresi dan eksistensi masyarakat.

Manajemen pemerintahan dalam rangka pemeliharaan stabilitas nasional dinamis dihadap-

kan pada berbagai kemungkinan kondisi stabilitas yang berubah sebagai berikut: (1) Kondisi stabilitas nasional berada pada kondisi normal, pada kondisi ini manajemen pemerintahan diselenggarakan dengan manajemen normal, seluruh fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh Dept/ LPND/ Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Koordinasi keterpaduan antar instansi terkait diselenggarakan melalui Forum Kabinet; (2) Kondisi stabilitas nasional berada pada kondisi krisis, pada kondisi ini manajemen pemerintahan harus menerapkan manajemen krisis dengan tahapan: (a) Manajemen krisis tingkat sektoral apabila fungsi pemerintahan mengalami kelumpuhan secara sektoral. Pada tingkat pusat yang mengambil aksi berdasarkan manajemen krisis adalah Departemen/ LPND yang bersangkutan, setelah Menteri/ Kepala LPND yang bersangkutan menerapkan manajemen krisis, diakomodasikan melalui Unit Pengendali Krisis Sektor (UPKS). Oleh sebab itu, pada Dept/ LPND dan Pemda harus selalu melekat fungsi manajemen krisis dan fungsi ini menjadi aktif apabila fungsi pemerintahan mengalami kelumpuhan secara sektoral; (b) Manajemen krisis lintas sektoral/ multidimensional apabila fungsi pe-

merintahan mengalami kelumpuhan pada dua sektor atau lebih. Pada tingkat pusat yang mengambil aksi berdasarkan manajemen krisis adalah Unit Pengendali Krisis Tingkat Pusat (UPKP) yang dinyatakan status aktifnya oleh Sidang Kabinet. UPKP pada dasarnya adalah Badan Fasilitas Staf yang membantu Presiden dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan segera dalam menanggulangi krisis yang terjadi. Pada tingkat sektor kegiatan manajemen krisis tetap berfungsi sesuai sektornya masing-masing, dikoordinasikan oleh UPKS, demikian pula pada tingkat daerah. Pada kondisi ini UPKP dapat membentuk Tim Asistensi/ Satgas untuk memperlancar koordinasi pengendalian krisis; (c) Manajemen krisis kewilayahan, pada kondisi ini Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengambil aksi untuk menanggulangi krisis dengan menerapkan manajemen krisis yang diakomodasikan dengan membentuk Unit Pengendali Krisis Daerah (UPKD).

Manajemen perubahan adalah salah satu metoda pemeliharaan stabilitas nasional dinamis yang cukup relevan untuk dipilih. Dengan pilihan ini maka penentuan status keadaan apakah dalam keadaan tertib atau darurat akan dapat ditetapkan tingkatan pengeralahan sumber-

daya agar mampu mendukung sasaran pengendalian status keadaan apakah dalam keadaan darurat atau status keadaan lainnya.

Penutup

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang pembinaan stabilitas nasional dinamis melalui manajemen perubahan. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Acuan Kepustakaan

1. Alexander, M.J. *Information System Analysis*. Chicago Science Research Associates, Inc. 1974.
2. Anderson, James E, *Cases in Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston. 1979.
3. Binder, leornado, James S. Colman, Joseph La Palombara, Lucian W Pye, Sindy Verba and Myran Weiner, *Crisis and Sequences in Political Development*, Pricenton University Press, 1971.
4. Dill, William R. "Administrative Decision Making", dalam Robert T. Golmbiewski et. Al. *Public Administration*, Chicago: Rand Mc. Nally & Company, 2 nd et, 1972.
5. Donald Eugene Smith, Prof. Of. Political Science, University of Pensylvania. *Religion, Polities and Social Change in the Third World*, The Free Press, N>Y., Collier Mc. Milen Ltd. London
6. Dunn, W.N., *Public Policy Analysis: An Introduction* Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1981.
7. Dvorin, E.P. dan Robert H. Simmons, *Public Administration: Values, Policy dan Change*, New York: lfred Publishing Coy., Inc 1977.
8. Friendrich, Carl J. Man and His Government, New York, Mc. Graw Hill. 1963.
9. Hasil Lokakarya nasional tentang Implementasi Pancasila dalam Mewujudkan Ksesjahteraan Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPKB bekerjasama dengan Yayasan Sinar Wijaya Indonesia Cs., di Jakarta tanggal 9 Oktober 2004.
10. Hertz Noreena, Dr. *The Silent Takeover, Global Capitalism and the Death of Democary*, Harper Callins Publisher Inc. N.Y. 2003
11. Hoogerwerf, R., A., (ed.), *Ilmu Pemerintahan* (diterjemahkan oleh R.L. Tobing), Jakarta : Penerbit Erlangga, 1983.
12. Hook Sidney, *Humanist Philosopy*, S. Hook, Philosopher of Demoracy and Humanism, By Paul Kurtz, 1983.
13. Kavanag. D, *Pergeseran-pergeseran Politik Dalam Masyarakat*, (diterjemahkan oleh Asep Hikmat),

- Bandung : C.V. Iqro, 1982
14. Lassweil, Harold D. And Abraham Kaplan, *Power and Society for Public Decisions*, Belmont, Calif: Wadsworth, 1986.
 15. Moerdiono dkk. *Citra Negara Persatuan Indonesia*, BP-7 Pusat, Jakarta 1996.
 16. Morgenthau, Hans J., Prof. & Prof. Kenneth W. Thomson, *Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace*, Miller Center of Public Affairs., Sixth Edition, By Alfred A. Knopf. Inc. 1978
 17. Quade, E.S, *Analysis for Public Decisions*, New York Elsevier North holland, 1975.
 18. Rosenbaum, W.A., *Political Culture*, New York : Praeger Publishers, 1975.
 19. Sanit, A., *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta . C.V. Rajawali, 1985
 - Sargent, L.T., *Contemporary Political Ideologies*, Homewood Illinois : The Dorsey Press, 1978.
 20. Steiner, George A. (ed), *Management Policy and Strategy*, New York, Macmillan Publishing Co. Inc. 1982.
 21. Tsurutami Takesugu, Prof. *The Politics of National Development Political Leadership in Transitional Societies*, Washington State University, 1973.
 22. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*